

## DAFTAR PUSTAKA

- Saleh, K. Wantjik. *Hak Atas Tanah*, Yudistira, Jakarta, 1985.
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Menuntaskan Peralihan Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Herman, Hermit. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Rashid, Harun Al. *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harun, Badriah. *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja, Yogyakarta, 2005.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2003.
- Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004.

Limbong, Bernhard, *Politik Tanah*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2014.

Al. Ghifari, Niko, *Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, 2010.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Badan Pertanahan Nasional, Pengarahan Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah pada Rapat Konsultasi Teknis Para Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Seluruh Indonesia, Jakarta, 2003.

Keputusan Presiden No.26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepala BPN RI Menangani dan Menyelesaikan Sengketa.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 2007 Tentang  
Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3  
Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus  
Pertanahan

[http://bukupertanahan.blogspot.com/2012/07/pendaftaran-tanah-secara-sistematik\\_2195.html](http://bukupertanahan.blogspot.com/2012/07/pendaftaran-tanah-secara-sistematik_2195.html).

<http://bpn.go.id/tentangbpn.aspx>.